

ISBN 978-602-18574-1-0

**DETERMINANT TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB
RISIKO KEUANGAN PERBANKAN DAN PERAN CORPORATE
GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Christian Jonathan

Ratnawati Kurnia

Universitas Multimedia Nusantara

Abstract :Mandatory Risk Disclosure for Banking Industry that have public accountability is become important to improve public trustworthy.The disclosure should be prepared based on regulation from Bank Indonesia and Financial Accounting Standard. The objective of this study was to obtain empirical evidence about the effect of ownership structure, size of board directors, reputation of audit firm towards compliance level of mandatory risk disclosure with corporate governance as moderating variable.

Samples in this study was selected by using purposive sampling method and the secondary data used in this study was analyzed by using multiple regression method. The samples in this study were 31 firms in bankingsector that were listed at Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2013.

The result of this study showed that ownership structure, size of board directors, reputation of audit firm simultaneously have significant effect toward compliance level of mandatory risk disclosure. Reputation of audit firm had significant effect towards compliance level of the mandatory risk disclosure. While ownership structure, size of board directors had no significant effect towards compliance level of the mandatory risk disclosure.Corporate governance doesn't moderate the relationship between ownership structure, size of board directors, reputation of audit firm towards compliance level of mandatory risk disclosure.

Keywords: Corporate Governance; Mandatory Risk Disclosure;Ownership Structure; Reputation of Audit Firm;Size of Board Directors

1. Pendahuluan

Dipercepatnya program AEC (ASEAN Economic Community) yang awal mulanya direncanakan tahun 2020 menjadi tahun 2015 membuat persaingan di dunia bisnis semakin meningkat.Hal ini dikarenakan AEC memberikan peluang kompetitor dari luar untuk masuk ke pangsa pasar Indonesia.Salah satu *blueprint* dari AEC adalah dengan dihapuskannya pajak untuk impor barang.Untuk mengembangkan bisnisnya, pengusaha Indonesia harus berpikir keras agar tidak kalah dengan kompetitor dari luar.

Perbankan harus mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk menyetorkan dana mereka. Hal ini merupakan salah satu jaminan yang harus dilakukan bank agar dapat menjalankan fungsinya serta tanggung jawabnya sebagai perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat perbankan harus menciptakan strategi-strategi yang inovatif. Setiap strategi yang dijalankan memiliki risiko. Perbankan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan risiko tersebut. Dana yang didapatkan bank berasal dari masyarakat sehingga rentan dengan berbagai risiko. Perbankan harus memperhitungkan risiko yang jelas sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengungkapan informasi tentang risiko dan ketidakpastian kini telah menjadi bagian yang penting dalam pelaporan keuangan. Praktik penyimpangan akuntansi oleh perusahaan-perusahaan besar telah meningkatkan diskusi terkait kebutuhan pengungkapan risiko (Linsley dan Shrives, 2005). *Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)* menerbitkan *paper* sejak tahun 1998 mengenai pentingnya pengungkapan risiko, hal inilah yang membuat perdebatan tentang pengungkapan risiko dimulai (Linsley, Shrives, dan Crumpton, 2006).

Pada mulanya semua pengungkapan informasi tambahan termasuk dalam kategori *voluntary disclosure*. *Voluntary disclosure* merupakan pengungkapan selain pengungkapan yang diwajibkan. Akibat tingginya tingkat pertumbuhan bisnis mengharuskan manajer untuk melakukan *mandatory disclosure* untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan harus berdasarkan pada peraturan-peraturan terkait seperti PSAK 60 revisi 2010 dan Peraturan Bank Indonesia. Untuk mengungkapkan hal ini tidaklah mudah, manajer harus berpikir keras hal mana yang harus diungkapkan secara jelas. Hal ini dikarenakan kompetitor dapat menggunakan pengungkapan tersebut sebagai strategi untuk mendapatkan *competitive advantage*.

Djuminah (2013) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan perbankan Indonesia pada tahun 2011 – 2012 di Indonesia telah mencapai 74,60%. Amran, Bin dan Hassan (2009) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan di Malaysia masih rendah. Industri perbankan sendiri rentan akan risiko yang timbul dari berbagai aspek. Risiko

merupakan faktor yang tidak dapat dihindari oleh Industri perbankan. Risiko ini dapat menyebabkan perbankan salah dalam mengambil keputusan yang penting. Bank merupakan *risk taking entities* (Oorschot, 2009). Pengungkapan risiko harus dikelola dengan baik oleh perbankan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangatlah penting karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi peristiwa besar seperti runtuhnya beberapa perusahaan besar. Kasus yang dapat dilihat seperti runtuhnya *Enron Corporation* pada tahun 2001 yang melakukan *window dressing* terhadap laporan keuangannya. Akibatnya kantor akuntan publik yang membantu melakukan kecurangan tersebut yaitu Arthur Andersen ikut dibubarkan juga. Hal ini memicu industri perbankan untuk menjalankan praktik GCG untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang industri perbankan.

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan pengungkapan risiko keuangan. Struktur kepemilikan merupakan hal yang penting terkait dengan asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hapsari, 2013). Penelitian Barako (2007), Mitra, Hossain dan Marks (2012), Fathi (2013) telah menunjukkan pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu penentu praktik *corporate governance* yang secara bertahap mempengaruhi pengambilan keputusan serta kualitas informasi keuangan (Mitra *et al.*, 2012).

Struktur kepemilikan yang dimaksud dibagi 2 yaitu, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan struktur kepemilikan menyebar (Djuminah, 2013). Struktur kepemilikan menyebar membuat pengendalian ditentukan oleh berbagai pihak. Hal ini disebabkan *shareholder* tersebut tidak memiliki persentasi jumlah kepemilikan yang signifikan, sehingga sangat sulit untuk satu pihak mengendalikan keputusan yang akan diambil dalam rapat pemegang saham. Struktur kepemilikan terkonsentrasi menyebabkan terjadinya pengendalian sepihak dari salah satu *shareholder*. Hal ini disebabkan *shareholder* tersebut memiliki persentasi jumlah kepemilikan yang signifikan dibanding *shareholder* lainnya. Dalam konteks ini *shareholder* yang memiliki kepemilikan signifikan dapat mempengaruhi keputusan dalam rapat pemegang saham.

Ukuran dewan direksi yang besar membuat masalah bagi perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi yang terlalu banyak menimbulkan kesulitan dalam hal pengambilan keputusan dan koordinasi. Dewan direksi yang sedikit akan baik terhadap perusahaan karena mempermudah pengambilan keputusan dan mempermudah dalam koordinasi. Selama tahun 2000 sampai 2002, 1.279 perusahaan yang diteliti dan dipelajari oleh Byard, Li dan Weintrop (2006), menemukan bahwa kualitas pengungkapan keuangan cenderung menurun sejalan dengan bertambahnya anggota dewan direksi. Oleh karena itu ukuran dewan direksi yang lebih sedikit diharapkan menghasilkan tingkat pengungkapan mengenai informasi risiko keuangan yang lebih tinggi.

Kantor akuntan publik (KAP) merupakan kontrol dari pihak eksternal perusahaan. Untuk menyakinkan kantor akuntan publik bahwa perusahaan dalam kondisi sehat, maka manajemen berusaha untuk meningkatkan tingkat pengungkapan risiko keuangan. KAP melihat bahwa manajemen memiliki internal kontrol yang baik dalam bidang penanganan risiko keuangan dan didukung dengan menjalankannya praktik *good corporate governance*. Manajemen dapat meningkatkan pengungkapan risiko keuangannya untuk memperoleh opini audit *unqualified* yang diberikan oleh KAP.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris apakah Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan Direksi, Reputasi KAP berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Teori Agensi

Teori agensi timbul karena adanya hubungan keagenan (suatu kontrak dimana satu orang atau lebih sebagai pemilik/prinsipal melibatkan orang lain/agen untuk melakukan pekerjaan tertentu (Djuminah, 2013). Hubungan tersebut mengasumsikan adanya perbedaan kepentingan pada pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Teori ini menyatakan bahwa adanya perbedaan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemilik saham. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan manajer yang lebih condong memaksimalkan keuntungan jangka pendek dibanding dengan keberlangsungan

perusahaan dimasa depan. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemegang saham dapat memberikan insentif bagi manajemen dalam bentuk biaya monitoring (gaji).

Manajer yang tidak menyampaikan informasi secara penuh kepada pihak *principal* terkait dengan perusahaan akan menimbulkan konflik yang disebut sebagai asimetri informasi. Menurut Scott (2003) terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan sebuah keadaan agen memiliki informasi lebih dibanding prinsipal sehingga menyebabkan perbedaan pendapat, sedangkan pada *moral hazard* merupakan kondisi perilaku agen akibat perbedaan informasi yang dimiliki. Ali, Trabelasi dan Summa (2007) menjelaskan bahwa dengan melakukan pengungkapan informasi dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat mengurangi konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2. Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan

Pengungkapan informasi dapat dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Hal yang diungkap dalam pengungkapan kualitatif adalah bagaimana risiko timbul, eksposur risiko, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko (IAI, 2015). Pada pengungkapan kuantitatif entitas harus mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (IAI, 2015).

Terdapat dua tipe dalam pengungkapan pada laporan tahunan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Eng dan Mak, 2003). *Mandatory disclosure* merupakan hal yang wajib dilakukan bagi entitas perbankan di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 mengalami pembaharuan ditahun 2009. Pembaharuan tersebut ditandai dengan Peraturan BI Nomor 11/25/PBI/2009. Menurut peraturan tersebut risiko-risiko yang harus diungkapkan antara lain : Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko hukum, Risiko reputasi dan Risiko strategik

Peraturan dari BI, perusahaan publik diwajibkan melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan melalui keputusan ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Pengungkapan wajib risiko keuangan diinterpretasikan melalui penerapan PSAK 50 Revisi 2006: Instrumen Keuangan-Penyajian dan Pengungkapan. Terdapat perubahan pada PSAK 50 Revisi 2006 yang digantikan oleh PSAK 60 Revisi 2010 tentang Instrumen Keuangan-Pengungkapan. Peraturan lain yang terkait mengatur pengungkapan risiko adalah Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan.

2.3. *Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan seperangkat mekanisme kontrol yang dirancang khusus untuk mengawasi setiap keputusan manajerial yang diambil, serta untuk menjamin terselenggaranya operasi yang efisien dari suatu perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan pihak pemangku kepentingan lainnya (Donnelly dan Mulcahy, 2008). Mekanisme pengawasan dilakukan melalui keberadaan dewan direksi, pemegang saham institusional dan operasi pasar sebagai pengendalian perusahaan.

Asas *Good Corporate Governance* terdiri dari beberapa komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran serta kesetaraan (KNKG, 2006). Hal ini menjadi wajib dilaksanakan untuk seluruh perusahaan. Terlebih untuk industri perbankan dengan mengimplementasikan GCG diharapkan lebih efisien dan aman.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa *corporate governance* merupakan determinan pada pola pengungkapan risiko instrumen keuangan. Taylor *et al.* (2008), serta Suhardjanto dan Dewi (2011) menemukan hubungan positif antara struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan risiko instrumen keuangan.

2.4. Struktur Kepemilikan

Kepemilikan menyebar merupakan saham yang secara relatif merata pada publik, tidak ada pihak yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan lainnya (Shinta dan Ahmar, 2011). Labelle dan Schatt (2005) menemukan bahwa kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan meningkat ketika kepemilikan menyebar (proporsi saham yang dimiliki publik cenderung tinggi). Kepemilikan menyebar membuat keputusan kebijakan perusahaan tidak terpengaruh signifikan hanya dari satu atau sekelompok orang, sehingga dalam menghasilkan kebijakan perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini menimbulkan perusahaan dapat menjalankan bisnisnya lebih baik lagi.

Ha₁: Struktur kepemilikan menyebar berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen diharapkan dapat memperkuat hubungan antara struktur kepemilikan menyebar dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan, entitas yang memiliki struktur kepemilikan menyebar cenderung mengambil keputusan untuk kepentingan entitas dan jika hal tersebut didukung dengan praktik *good corporate governance* maka, tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan akan meningkat.

Ha₂: *Corporate governance* memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan menyebar dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Struktur kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan lainnya.

Ali *et al.* (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan dan kualitas pengungkapan. Konsentrasi kepemilikan yang tinggi cenderung manajer lebih sedikit dalam melakukan pengungkapan. Fathi (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi cenderung kurang dalam mengungkapkan informasi yang memadai, perusahaan cenderung mengungkapkan informasi secara terbatas.

Ha₃: Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen diharapkan dapat memperlemah hubungan antara struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan, entitas yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung mengambil keputusan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya dan jika hal tersebut ditangani dengan praktik *good corporate governance* maka, tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan akan meningkat.

Ha₄: *Corporate governance* memoderasi hubungan antara stuktur kepemilikan terkonsentrasi dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko.

2.5. Ukuran Dewan Direksi

Dalam struktur organisasi sebuah perusahaan, dewan direksi memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan serta dalam hal pelaksanaan kepengurusan perusahaan serta pengelolaan perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh kesepakatan bersama. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (BAPEPAM, 2007).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi paling kurang tiga orang dan seluruhnya wajib berdomisili di Indonesia. Anggota dewan direksi suatu perusahaan yang jumlahnya lebih dari tujuh atau delapan orang tampak tidak akan efektif (Florackis dan Ozkan, 2008).

Ukuran dewan direksi yang besar merupakan masalah bagi perusahaan, jumlah anggota dewan direksi yang banyak akan menimbulkan kesulitan dalam hal koordinasi. Menurut Matoussi dan Chakroun (2008) ukuran dewan direksi yang kecil akan mempermudah dalam hal koordinasi.

Penelitian yang dilakukan Byrad *et al.* (2006) yang mempelajari 1.279 perusahaan selama periode 2000 sampai 2002, menemukan bahwa kualitas pengungkapan keuangan cenderung menurun seiring dengan peningkatan jumlah anggota dewan direksi. Oleh karena itu ukuran dewan direksi yang kecil lebih diharapkan menghasilkan pengungkapan yang lebih baik.

Ha₅: Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib risiko keuangan.

Corporate governance dapat membantu kinerja dari dewan direksi. Praktik *good corporate governance* membuat dewan direksi lebih cepat dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan *corporate governance* yang baik membuat manajemen entitas dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat dan lebih lengkap. Dewan direksi yang memiliki informasi yang lengkap maka akan menghasilkan keputusan yang baik sehingga entitas mengungkapkan risiko keuangan lebih banyak.

Kinerja dewan direksi yang baik dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam pengungkapan wajib risiko. Hal ini tidak terlepas dengan praktik *good corporate governance* yang terjadi di perusahaan. Sebagian atribut tersebut dipengaruhi oleh jumlah dewan direksi yang menjabat di perusahaan tersebut.

Ha₆: *Corporate governance* memoderasi hubungan antara ukuran dewan direksi dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

2.6. Reputasi Kantor Akuntan Publik

Pengklasifikasian dari reputasi kantor akuntan publik ini dengan asumsi bahwa kantor akuntan publik yang masuk kategori *The Big Four* dinilai memiliki jaringan yang luas dan profesionalitas yang dapat membuat perusahaan mengungkapkan yang lebih baik dibanding dengan kantor akuntan publik lainnya. Fathi (2013) menyatakan keberadaan audit eksternal secara signifikan mempengaruhi jumlah informasi yang diungkapkan walaupun pengungkapan informasi keuangan menjadi tanggung jawab dewan direksi. KAP *big four* memiliki insentif untuk menjaga independensi mereka dan menyaratkan standar yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan pada perusahaan yang di audit.

Ha₇: Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Dalam penelitian Djuminah (2013) menemukan bahwa *corporate governance* memiliki hubungan positif antara tingkat pengungkapan risiko wajib keuangan. Selain itu menurut penelitian Taylor *et al.* (2008) mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan determinan pada pola pengungkapan risiko. Kantor akuntan publik akan memberikan opini tentang entitas yang mereka audit. Untuk memberikan opini tersebut banyak pertimbangan yang harus dilakukan, salah satunya yaitu pengungkapan risiko. *Corporate governance* sendiri membuat entitas untuk mengungkapkan risiko lebih dalam. Dengan bantuan pihak eksternal yaitu kantor akuntan publik diharapkan tingkat pengungkapan risiko yang dilakukan entitas akan meningkat.

Ha₈: *Corporate governance* memoderasi hubungan antara reputasi KAP dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

3. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2013. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2012 – 2013 dan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2012 – 2013. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan (*annual report*) perbankan periode 2012 – 2013. Data diperoleh dari situs www.idx.co.id dan situs resmi (*website*) perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Klasifikasi pengungkapan wajib risiko keuangan mengacu pada peraturan PSAK 60 (revisi 2010) yang terdiri dari 39 pengungkapan yaitu: Risiko kredit (14 item pengungkapan), Risiko pasar yang terdiri dari risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga lain (masing-masing memiliki tujuh item pengungkapan) dan Risiko likuiditas (4 item pengungkapan).

Skor pengungkapan didapatkan dari hasil perhitungan rumus jumlah skor item bank B dibagi dengan jumlah maksimum yang bisa didapatkan oleh bank B. Model scoring ini juga digunakan pada penelitian Oorshot (2009) dan penelitian Suhardjanto dan Dewi (2011). Variabel ini diukur dengan skala rasio.

$$DSCORE_{BY} = \frac{1}{MAX_{BY}} \sum_{i=1}^n SCORE_{iBY}$$

$DSCORE_{BY}$ = Skor pengungkapan bank B tahun Y
 $MAX_{BY}(39)$ = Skor maksimum bank B tahun Y
 i = Item pada kerangka pengungkapan
 $SCORE_{BY}$ = Skor item pada bank B tahun Y

Variabel Independen dalam penelitian ini :

1. Kepemilikan Menyebar, yaitu struktur kepemilikan perusahaan yang rata-rata kepemilikan sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas, sehingga perusahaan tidak dapat dipengaruhi oleh hanya seseorang atau sekelompok pemegang saham. Kepemilikan yang persentase kepemilikannya kurang dari 5% dikategorikan sebagai kepemilikan menyebar.

$$DISP = \text{persentase kepemilikan saham} < 5 \%$$

2. Kepemilikan Terkonsentrasi, yaitu struktur kepemilikan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan perusahaan. Variabel kepemilikan terkonsentrasi diukur melalui persentase kepemilikan saham terbesar. Variabel ini diukur dengan skala rasio.

$$CONC = \text{persentase kepemilikan saham terbesar}$$

3. Ukuran Dewan Direksi, yaitu banyaknya anggota dewan direksi yang menjalankan sebagaimana fungsinya yang sesuai dengan peraturan perusahaan tersebut. Dewan direksi memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan oleh karena itu hal ini mempengaruhi tingkat pengungkapan. Variabel ini diukur dengan skala rasio.

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \sum \text{Anggota Direksi Perusahaan}$$

4. Reputasi Kantor Akuntan Publik, yaitu suatu ukuran dimana perusahaan yang menggunakan KAP *big-four* akan mengungkapkan informasi lebih banyak. Model scoring ini juga digunakan pada penelitian Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010) menggunakan indikator penilaian reputasi KAP dengan variabel *dummy* yaitu skor 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh *Big Four* dan skor 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh *Non-Big Four*. Variabel ini diukur dengan skala nominal.

$$\text{KAP Big Four} = 1; \text{KAP Non-Big Four} = 0$$

Variabel Moderasi

Nilai dari variabel *corporate governance* diidentifikasi berdasarkan metode *scoring* pada *checklist item* yang mengacu pada beberapa peraturan. *Disclosure index study good corporate governance* merujuk pada Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006), Pengukuran variabel *Corporate Governance Index* (CGI) mengacu pada penelitian Bhuiyan dan Biwas (2007) yang dikelompokkan menjadi *financial disclosures, nonfinancial disclosures (Company Objectives, Ownership and Shareholder' Right, Governance Structure ad Policies, Members of the Board and key executives, Material issues regarding employees, environmental and social stewardship,*

Material foreseeable risk factors, Independence of Auditors), annual general meeting and timing and means of disclosure.

$$CGI = \frac{\text{Total skor item yang diungkapkan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkapkan}}$$

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah model persamaan regresi berganda :

$$FINDISC = \beta_0 + \beta_1 DISP + \beta_2 CONC + \beta_3 BSIZE + \beta_4 KAP + \varepsilon$$

Keterangan:

| | | |
|---------------|---|--|
| FINDISC | = | Tingkat Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan |
| DISP | = | Kepemilikan Menyebar |
| CONC | = | Kepemilikan Terkonsentrasi |
| BSIZE | = | Ukuran Dewan Direksi |
| KAP | = | Reputasi KAP |
| β | = | Koefisien Regresi |
| ε | = | Error |

4. Hasil Pembahasan

Sampel penelitian adalah 31 perusahaan. 18 observasi menunjukkan perusahaan menggunakan KAP *Non Big Four* dan 44 observasi menggunakan KAP *Big Four*.

Normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan sig 0,923 (>0,05) maka data residual berdistribusi normal. Hasil uji menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi, tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 dan tidak terjadi heteroskedastisitas

Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis 1,3,5 dan 7 (Tabel 4.1). Nilai R sebesar 0,542 menunjukkan adanya korelasi positif yang cukup kuat antara struktur kepemilikan, ukuran dewan direksi dan reputasi KAP dengan tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Nilai *adjusted R square* 0,245 menunjukkan 24,5% tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen kepemilikan menyebar, kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan direksi dan reputasi KAP. Sisanya sebesar 75,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Berdasarkan Tabel 4.2, nilai F statistik menunjukkan nilai 5,942 dengan tingkat signifikansi 0,000, menunjukkan bahwa model regresi menunjukkan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu (Tabel 4.3)

$$\text{FINDISC} = 0,247 \text{ DISP} + 0,074 \text{ CONC} + 0,115 \text{ BSIZE} + 0,441 \text{ KAP}$$

Untuk variabel struktur kepemilikan menyebar diperoleh nilai t sebesar 1,767 dengan sig 0,083. Dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan menyebar tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Struktur kepemilikan menyebar perbankan di Indonesia tidak meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hal ini dikarenakan persentase saham yang dimiliki oleh publik rendah, yang membuat publik tidak dapat mempengaruhi hasil dari keputusan rapat umum pemegang saham. Keputusan yang berasal dari rapat umum pemegang saham ini menguntungkan pihak yang mengendalikan entitas tersebut dengan cara memiliki persentase saham terbesar. Keputusan dalam melakukan pengungkapan risiko keuangan pun dikendalikan oleh sebagian orang tersebut, sehingga kualitas dari tingkat pengungkapan tidak meningkat.

Untuk variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi diperoleh nilai t sebesar 0,523 dengan sig 0,603. Dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Struktur kepemilikan perbankan di Indonesia

cenderung dimiliki oleh sebagian pihak, sehingga menimbulkan *private benefit*. Hal ini berdampak manajemen entitas terpengaruh oleh pihak tersebut. Entitas harus menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Badan pengawas sebagai pihak eksternal mengawasi kegiatan entitas agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Untuk variabel ukuran dewan direksi diperoleh nilai t sebesar 0,905 dengan sig 0,369. Dapat disimpulkan bahwa H_{a5} ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Dalam menentukan luasnya pengungkapan risiko keuangan, ukuran dewan direksi tidak memiliki hubungan pada kedua hal tersebut. Melainkan efektivitas dari keberadaan dewan direksi tersebut. Ukuran / jumlah dewan direksi yang besar pun dapat menghasilkan pengungkapan yang lebih baik dengan memiliki koordinasi dan efektivitas yang baik.

Untuk variabel reputasi kantor akuntan publik diperoleh nilai t sebesar 3,195 dengan sig 0,002. Dapat disimpulkan bahwa H_{a7} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Analisis residual dalam penelitian ini digunakan untuk menguji *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan menyebar, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan direksi dan reputasi KAP terhadap tingkat kepatuhan wajib risiko keuangan. Hasil uji residual (table 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7) menunjukkan tingkat kepatuhan wajib risiko keuangan (FINDISC) memiliki sig > 0.05 . *Corporate governance* tidak memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan menyebar, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan direksi dan reputasi kantor akuntan publik terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hal ini dikarenakan persentase saham yang dimiliki oleh publik rendah, sehingga penerapan *Corporate*

Governance tidak mempengaruhi hasil dari keputusan rapat umum pemegang saham. Struktur kepemilikan perbankan di Indonesia cenderung dimiliki oleh sebagian pihak, sehingga menimbulkan *private benefit* sehingga penerapan *Corporate Governance* tidak mempengaruhi pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham

5. Simpulan, Implikasi, Keterbatasan dan Saran

Struktur kepemilikan menyebar, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukurandewan direksi dan reputasi KAP memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Namun secara parsial hanya Reputasi KAP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan, sehingga dalam rapat umum pemegang saham perlu pertimbangan yang matang dalam memilih KAP yang memiliki reputasi baik.

Struktur kepemilikan menyebar, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan direksi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Sehingga perbankan perlu memperhatikan struktur kepemilikannya agar lebih merata antar kepemilikan publik, kepemilikan oleh pihak tertentu, kepemilikan asing maupun kepemilikan pemerintah, agar seluruh stakeholder dapat terwakili dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Efektivitas dari keberadaan dewan direksi juga perlu ditingkatkan agar memiliki peran yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan perbankan untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap publik

Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian ini hanya sebesar 24,5% sehingga untuk penelitian selanjutnya, menambahkan variabel independen untuk tingkat kepatuhan wajib risiko keuangan, seperti struktur kepemilikan pemerintah dan struktur kepemilikan asing

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. B., S. Trabelsi dan M. G. Summa. 2007. *Disclosure quality and ownership structure: evidence from the French stock market*.
- Amran, A., A. M. R. Bin, dan B. C. H. M. Hassan. 2009. Risk reporting: An exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal*, 24 (1): 39-57.
- Bank Indonesia. 2003. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- _____. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- _____. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- _____. 2006. Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
- _____. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 tentang Perseroan Terbatas.
- Barako, D. G. 2007. Determinant of voluntary disclosure in Kenyan companies annual reports. *African Journal of Business Management*, 1 (5): 113-128.
- Byard, D., Y. Li, dan J. Weintrop. 2006. Corporate governance and the quality of financial analysts' information. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25: 609-625.
- Djuminah, R. W. 2013. Pengaruh struktur kepemilikan, jenis kap terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko: corporate governance sebagai variabel moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 5: 4638-4669. Manado: Ikatan Akuntan Indonesia
- Donnelly, R dan M. Mulcahy. 2008. Board structure, ownership, and voluntary disclosure in Ireland. *Journal Compilation*, 16 (5): 416-429.
- Eng, L.L., dan Y.T. Mak. 2003. Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22: 325-345.
- Fathi, J. 2013. Corporate governance and the level of financial disclosure by Tunisian firm. *Journal of Business Studies Quarterly*, 4 (3): 95-111.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, N. A. 2013. Pengaruh karakteristik agen dan jenis KAP pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan bank, dengan corporate governance sebagai variabel moderasi.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor: 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
- Komite Nasional Kebijakank Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: KNKG.
- Labelle, R., dan A. Schatt. 2005. Ownership structure and financial reporting of French companies. *Finance Control Strategy*, 8 (3): 77-104.
- Linsley, P.M dan P.J. Shrides. 2005. Transparency and the disclosure of risk information in the banking sector. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 13 (3): 205-214.
- Linsley, P.M., P.J. Shrides, dan M. Crumpton. 2006. Risk disclosure: an exploratory study of UK and Canadian banks. *Journal of Banking Regulation*, 7 (3/4): 268-282.

- Linsley, P.M dan P.J. Shrivess. 2006. Risk reporting: a study of risk disclosures in the annual reports of UK companies. *The British Accounting Review*, 38: 387- 404.
- Matoussi, H., dan R. Chakroun. 2008. *Board composition, ownership structure and voluntary disclosure in annual reports: Evidence from Tunisia*. <http://www.researchgate.net/publication/228435020> Board composition ownership structure and voluntary disclosure in annual reports Evidence from Tunisia
- Mitra, S., M. Hossain dan B. R. Marks. 2012. Corporate ownership characteristics and timeliness of remediation of internal control weaknesses. *Managerial Auditing Journal*, 27 (9): 846-877.
- Oorschot, L. V. 2009. *Risk reporting: An analysis of German banking industry*.http://oathesis.eur.nl/ir/repub/asset/5413/M598-vanOorschot_294874.pdf
- Scott, William R. 2012. *Financial Accounting Theory 6ed*. Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Sekaran, Uma. 2013. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Shinta, N. P., dan N. Ahmar. 2011. Eksplorasi struktur kepemilikan saham publik di Indonesia tahun 2004–2008. *The Indonesian Accounting Review*, 1 (2): 145 – 154.
- Suhardjanto, D. dan A. Dewi. 2011. Pengungkapan risiko finansial dan tata kelola perbankan: Studi empiris perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15 (1): 105-118.
- Taylor, G., G. Tower, M.V.D. Zahn dan J. Neilson. 2008. Corporate governance determinants on Australian resource companies’s financial instrument disclosure practices. *Asian Review of Accounting*, 16 (1): 56-73.

www.bi.go.id
www.idx.co.id

Tabel 4.1 Hasil Uji Koefisiendeterminansi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,542 ^a | ,294 | ,245 | ,06962641 |

a. Predictors: (Constant), KAP, DISP, BSIZE, CONC

Tabel 4.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 Regression | ,115 | 4 | ,029 | 5,942 | ,000 ^b |
| 1 Residual | ,276 | 57 | ,005 | | |
| Total | ,392 | 61 | | | |

a. Dependent Variable: FINDISC

b. Predictors: (Constant), KAP, DISP, BSIZE, CONC

Tabel 4.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,299 | ,045 | | 6,636 | ,000 |
| DISP | ,123 | ,070 | ,247 | 1,767 | ,083 |
| CONC | ,028 | ,054 | ,074 | ,523 | ,603 |
| BSIZE | ,003 | ,004 | ,115 | ,905 | ,369 |
| KAP | ,072 | ,023 | ,411 | 3,185 | ,002 |

a. Dependent Variable: FINDISC

Tabel 4.4 Hasil Uji Residual Hipotesis kedua

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,084 | ,030 | | 2,809 | ,007 |
| FINDISC | -,067 | ,071 | -,121 | -,944 | ,349 |

a. Dependent Variable: ABSRes_6

Tabel 4.5. Hasil Uji Residual Hipotesis ke empat

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,095 | ,028 | | 3,415 | ,001 |
| FINDISC | -,095 | ,066 | -,184 | -1,449 | ,152 |

a. Dependent Variable: ABSRes_7



Tabel 4.6. Hasil Uji Residual Hipotesis ke enam

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,086 | ,027 | | 3,197 | ,002 |
| | FINDISC | -,093 | ,063 | -,188 | -1,481 | ,144 |

a. Dependent Variable: ABSRes_8

Tabel 4.7 Hasil Uji Residual Hipotesis kedelapan

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,091 | ,024 | | 3,797 | ,000 |
| | FINDISC | -,087 | ,056 | -,198 | -1,561 | ,124 |

a. Dependent Variable: ABSRes_9